

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Fungsi pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat yang telah dituangkan di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Selain itu fungsi pendidikan juga tercermin dalam Pasal 31, ayat (1) berbunyi bahwa : "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.". Selanjutnya ayat (3) menyatakan : "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang."

Apa yang tersurat dan tersirat dalam pasal tersebut merupakan landasan yang sangat kuat bagi pemerintah untuk senantiasa menata sitem peadidikan nasional yang harus mewadahi fungsi pendidikan nasional seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), Pasal 3, bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mencapai hal tersebut dilakukan melalui berbagai jenjang pendidikan, salah satu upaya tersebut dilakukan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan. Di mana peranan pendidikan menengah kejuruan dalam tatanan sistem pendidikan nasional di negara kita mempunyai posisi yang strategis, khususnya dalam mengembangkan sumber daya manusia menjadi manusia yang produktif, seperti dijelaskan dalam Supriadi (2002: 17) bahwa : "... pendidikan kejuruan bertujuan untuk menghasilkan manusia produktif,

yakni manusia kerja, bukan manusia beban bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.”  
kejuruan. Pengembangan sistem pendidikan yang mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional dirancang sedemikian sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan peserta didik sendiri melalui kerjasama dengan semua pihak.

Demikian juga lembaga pendidikan kejuruan di Indonesia yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kejuruan maka juga harus melakukan kerja sama dengan masyarakat dunia usaha, industri, asosiasi profesi, serta lembaga terkait terutama di dalam menetapkan standar keahlian, pengembangan kurikulum, sarana dan prasarana, peralatan, dan kebijakan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pendidikan di SMK bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik guna menyiapkan mereka sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang terampil, terdidik, dan memiliki etos kerja profesional, serta mampu mengembangkan diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan Menengah Kejuruan dalam tatanan sistem pendidikan nasional di negara kita mempunyai posisi yang strategis, khususnya dalam mengembangkan sumber daya manusia pada bidang kejuruan, hal ini sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 dalam penjelasan pasal 15, yang berbunyi :

“Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. “

Hal ini juga diatur menurut Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah Bab 11 pasal 3 ayat (2) mengatakan bahwa :

“Pendidikan Menengah Kejuruan mengutamakan persiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta pengembangan sikap profesional”.

Dari rumusan tersebut maka sekolah kejuruan di antaranya memiliki karakteristik sebagai berikut (Djojonegoro, 1999) : (1) pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja; (2) fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang dibutuhkan dunia kerja; (3) hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses dunia pendidikan kejuruan; (4) pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi; (5) pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas sebagai obyek perolehan keterampilan.

Berdasarkan karakteristik di atas, maka dalam mengelola pendidikan kejuruan harus benar-benar diarahkan untuk memasuki lapangan kerja sehingga segala kegiatan pembelajaran di SMK harus ditekankan pada penguasaan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja, yang tidak hanya meliputi keterampilan kerja namun juga sikap kerja maupun nilai-nilai atau etos kerja yang sesuai dengan dunia kerja tersebut. Agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan, hendaknya pendidikan kejuruan memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dikemukakan Charles Prosser (Djojonegoro, 1999), bahwa (1) pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan dimana siswa dididik dan dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti ia akan bekerja; (2) pendidikan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan dimana tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat dan mesin yang sama seperti yang ditetapkan ditempat kerja; (3) pendidikan kejuruan akan efektif jika dia mendidik dan melatih seseorang dalam kebiasaan berfikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri; (4) pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya telah mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja yang akan dilakukan; (5)

pendidikan kejuruan memerlukan biaya tertentu dan jika tidak terpenuhi maka pendidikan kejuruan tidak boleh dipaksakan beroperasi.

Selain kriteria di atas maka SMK harus menjawab kebutuhan siswa SMK, seperti diungkapkan Dikmenjur (Supriadi, 2002) bahwa :

”Satu-satunya yang “konstan” dalam sistem SMK adalah kebutuhan para siswanya. Setiap siswa akan mencari program yang dapat memberikan keterampilan, pengetahuan, sikap kerja, pengalaman, wawasan dan hubungan yang dapat membantu dirinya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pilihannya.”

Oleh karena itu selain kriteria-kriteria yang telah disebutkan di atas maka SMK harus menyediakan program keahlian yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut, sehingga mau tidak mau program keahlian yang dibuka haruslah sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dari pandangan di atas menunjukkan bahwa transformasi pendidikan kejuruan harus merupakan replika dunia kerja. Sehingga pencapaian keterampilan, kebiasaan berfikir dan etika kerja terbentuk sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Sumber-sumber daya yang mempunyai keterampilan ini sangat penting dalam rangka mengisi lapangan pekerjaan dalam pelaksanaan pembangunan untuk menghadapi persaingan *global* yang semakin ketat dan tajam. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal di antaranya tenaga kerja terampil tersebut merupakan orang yang terlibat langsung dalam proses produksi barang maupun jasa, karena itu menduduki peranan penting dalam menentukan tingkat mutu dan biaya produksi. Selain itu tenaga kerja yang memiliki keterampilan sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan industrialisasi suatu negara. Dalam era persaingan *global* yang berkembang semakin ketat dan tajam seperti sekarang ini tenaga kerja terampil merupakan merupakan faktor keunggulan dalam menghadapi persaingan *global*. Dengan demikian ada beberapa hal yang juga menjadi dasar pertimbangan mengapa tenaga kerja yang memiliki kompetensi kejuruan sangatlah penting artinya karena orang yang memiliki keterampilan memiliki peluang tinggi untuk bekerja dan produktif. Semakin

banyak warga suatu bangsa yang terampil dan produktif maka semakin kuat kemampuan ekonomi negara yang bersangkutan. Sebaliknya pula semakin banyak warga suatu bangsa yang tidak terampil, maka semakin tinggi kemungkinan pengangguran yang akan menjadi beban ekonomi negara yang bersangkutan. Akhirnya yang perlu dikedepankan juga, kemajuan teknologi adalah faktor penting dalam penerapan teknologi, hal ini akan bisa menjadi faktor keunggulan bila terdapat tenaga kerja terampil menguasai dan mengaplikasikannya.

Bertitik tolak dari tuntutan dan karakteristik pendidikan menengah kejuruan, juga sejalan dengan pandangan-pandangan pemerhati/pakar mengenai peranan pendidikan kejuruan, dituntut untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kriteria : (1) kesiapan memasuki lapangan kerja sesuai dengan bidangnya; (2) mempunyai kemampuan untuk mengadaptasi dan berkompetisi di masyarakat (dunia usaha/industri); (3) mempunyai kesiapan untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu dalam dunia usaha/industri; (4) memiliki budaya kerja industri, berfikir rasional, disiplin, terikat oleh mutu dan standar.

Akan tetapi untuk memenuhi tuntutan kriteria lulusan seperti tersebut di atas, ternyata masih banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh SMK, yang antara lain :

1. Perilaku dan kebiasaan belajar mengajar di sekolah yang kurang mencerminkan replika lingkungan kerja sebagaimana dikemukakan oleh Djojonegoro (1999) bahwa perilaku dan kebiasaan belajar mengajar di sekolah yang terkonsep sebagai dunia sekolah, berbeda jauh dengan perilaku, cara kerja dan kebiasaan yang ada di industri. Selain itu juga perilaku sekolah cenderung melaksanakan program pendidikan demi pendidikan dan kurang memahami pasar, wawasan mutu dan wawasan keunggulan untuk menghadapi persaingan.



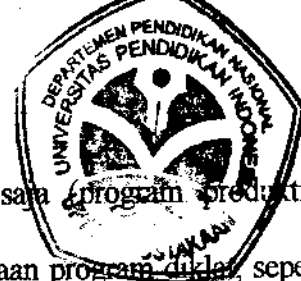
2. Kecenderungan pihak industri yang lebih memilih mempekerjakan tamatan sekolah umum daripada kejuruan, dalam hal ini Pakpahan (Supriadi, 2002) mengemukakan bahwa : “Dunia usaha dan industri lebih cenderung mempekerjakan tamatan Sekolah menengah Atas/Umum daripada tamatan STM, SMEA, SMKK, atau tamatan SMK lainnya.”
3. Tuntutan dunia kerja tidak hanya terhadap kesediaan tenaga terampil tetapi tuntutan terhadap etika kerja, Djojonegoro (1999) mengemukakan secara jelas sebagai berikut: “Proses industrialisasi itu sendiri menuntut nilai baru budaya industri, antara lain kebiasaan berfikir rasional, bekerja tepat waktu, bekerja secara sistem., terikat mutu standar dan bersemangat kerja keras“. Juga menurut Pakpahan (Supriadi, 2002) dinyatakan bahwa: “Tamatan SMK terbiasa santai dengan jam belajar dan bekerja sedikit, padahal dunia industri menuntut kerja keras dengan jam kerja rata-rata 40 jam per minggu, bahkan sering hingga larut malam.”
4. Terbatasnya kesempatan kerja di dunia usaha dan industri (Dikmenjur, 2000), membuat SMK harus menyiapkan program yang benar-benar sesuai kebutuhan dunia kerja serta menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar yang ada.
5. Dari hasil observasi lapangan (Tim CBT – Dit. Dikmenjur, 2001), ternyata bahwa peralatan praktek yang dimiliki sekolah sangat bervariasi baik dilihat dari kuantitas maupun kualitas, yaitu umumnya memiliki kekurangan dalam hal jenis maupun jumlah dan kondisinya.

Dari gejala-gejala tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan antara kompetensi tamatan SMK dengan kompetensi yang dituntut dunia usaha/industri. Untuk itu sejak tahun 1994 pemerintah menetapkan kurikulum SMK yang mengacu pada kompetensi dunia usaha/industri, jadi yang dimaksud dengan kompetensi tamatan di sini

sebenarnya adalah kompetensi kejuruan. Kurikulum SMK tahun 1994 tersebut kemudian mengalami penyempurnaan dengan ditetapkannya Kurikulum SMK Edisi Tahun 1999. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ketika kurikulum sudah disempurnakan dengan mengacu pada kompetensi kejuruan yang ada pada dunia usaha/industri, masih saja terjadi kesenjangan antara kompetensi kejuruan tamatan SMK dengan tuntutan dunia usaha/industri. Hal seperti di atas menunjukkan bahwa SMK masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki dengan program-program dan kegiatan yang lebih relevan dan bermutu. Berbagai upaya penataan dan pengembangan terus dilakukan pemerintah terhadap komponen-komponen dan bidang garapan untuk mendukung dan mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi sekolah kejuruan, sebagai upaya untuk menghasilkan tamatan yang memenuhi harapan semua pihak.

Dari sisi penyelenggaraan, SMK diharapkan mampu menerapkan sistem pembelajaran yang bermuara pada upaya memenuhi tuntutan dunia usaha/industri melalui kompetensi tamatan yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha/industri. Oleh karena itu menurut Priowirjanto (Supriadi, 2002) dan Dikmenjur (2000) pembelajaran dengan pendekatan mata pelajaran diubah menjadi pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi karena pendekatan diklat ini sangat tepat untuk melatih tenaga kerja baru maupun meningkatkan kemampuan teknis tenaga kerja yang sudah ada di industri. Selain itu diklat berbasis kompetensi memberikan penekanan pada penguasaan kompetensi dan jaminan kesamaan kualitas antara satu tamatan dengan lainnya (Nagel, 2000). Selanjutnya juga pada diklat berbasis kompetensi ini lebih menekankan pada prinsip "belajar tuntas" dan menggunakan *criterion reference* dalam proses penilaiannya.

Permasalahan yang terjadi dalam implementasi diklat berbasis kompetensi di SMK adalah kerumitan dalam pengelolaannya (Turnbull, 2000), walaupun konsep diklat berbasis



kompetensi hanya diterapkan pada program diklat kejuruan saja (program produktif). Kerumitan yang dialami di antaranya adalah dalam hal perencanaan program diklat, seperti penetapan standar kompetensi yang menjadi acuan diklat berbasis kompetensi. Diklat berbasis kompetensi dimulai dari penetapan standar kompetensi, sementara kurikulum di SMK sudah ada dan sudah berjalan. Permasalahan akan timbul jika program diklat yang diselenggarakan di SMK ternyata tidak sesuai dengan tuntutan standar kompetensi. Di sini akan timbul dilema apakah akan mengikuti kurikulum atau akan mengikuti standar kompetensi.

Permasalahan lain dari sisi perencanaan, adalah pada penyiapan faktor pendukung diklat (Tim CBT – Dit. Dikmenjur, 2001), dalam hal ini dituntut adanya analisis pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang mendukung tercapainya sebuah kompetensi. Juga pada diklat berbasis kompetensi dituntut adanya guru yang kompeten, yang telah disertifikasi dari lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi. Selain itu tuntutan terhadap kelengkapan fasilitas belajar, bahan ajar dan media pembelajaran yang sangat dibutuhkan dalam diklat berbasis kompetensi, apalagi diklat berbasis kompetensi akan lebih efektif bila pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan secara *individual*.

Kemudian dalam hal pelaksanaan diklat khususnya dalam hal pengelolaan proses pembelajaran, sebenarnya diklat berbasis kompetensi akan lebih efektif bila dilakukan pembelajaran secara *individual*, padahal proses pembelajaran di SMK selama ini pada umumnya dilakukan secara klasikal. Permasalahan lain yang tidak kalah menariknya adalah dalam hal uji kompetensi dan sertifikasi. Selama ini uji kompetensi telah dilakukan sekaligus dengan pelaksanaan Ujian Akhir Nasional, jadi soal dibuat oleh pihak pemerintah pusat sedangkan penguji berasal dari industri dan sertifikasi diberikan oleh Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (Dikmenjur, 2000). Yang perlu dipertanyakan adalah apakah uji



kompetensi yang dilakukan telah benar-benar mengacu pada standar kompetensi yang diakui oleh industri dan apakah pengujinya benar-benar menguasai cara menguji kompetensi peserta pelatihan yang dalam hal ini adalah siswa SMK. Jadi masih terdapat beberapa masalah yang ada dalam penerapan diklat berbasis kompetensi di SMK.

Suatu hal yang perlu diingat bahwa diklat berbasis kompetensi sendiri di Indonesia belum menemukan bentuknya yang pasti, karena itu sebagai implikasinya juga timbul masalah dalam pengelolaannya. Pengelolaan diklat berbasis kompetensi harus mendapatkan perhatian secara khusus dan berbeda dengan diklat yang lain, karena pendekatan sistem diklat dengan pola pendekatan diklat berbasis kompetensi ini dipandang masih belum lama diperkenalkan pada pendidikan kejuruan di Indonesia sehingga saat ini masih sedang dalam pencarian bentuknya yang pasti. Selain itu masalah penting yang perlu diperhatikan dalam diklat berbasis kompetensi adalah dalam hal pengelolaannya, seperti dikatakan Turnbull (2000 : 15) bahwa : "... salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam diklat berbasis kompetensi adalah pengelolaannya yang rumit karena diperlukan konsistensi dan kerja sama dengan pihak lain".

Selain itu mengingat prinsip-prinsip diklat berbasis kompetensi yang harus mengacu pada lima faktor, yaitu penetapan standar kompetensi, penyiapan faktor pendukung, proses pembelajaran, uji kompetensi dan sertifikasi, maka diperlukan pengelolaan yang handal dalam menanganinya sehingga hasil diklat dapat sesuai dengan yang diharapkan yaitu penguasaan kompetensi oleh peserta diklat sesuai dengan standar yang menjadi acuan diklat, karena diklat berbasis kompetensi adalah sebuah diklat yang berbasis standar. Berdasarkan pengamatan awal, walaupun kurikulum SMK telah berlabel kurikulum berbasis kompetensi, namun ternyata masih terdapat beberapa kesenjangan dalam hal standar kompetensi yang dipakai, penyiapan faktor pendukung diklat, proses pembelajaran, uji kompetensi yang



dilakukan serta sertifikasinya. Dan mengingat prinsip diklat berbasis kompetensi yang mengacu pada *mastery learning*, ternyata dari diklat yang telah dilakukan selama ini di SMK, hal tersebut belum terlaksana.

Permasalahan yang lebih luas lagi yang perlu diperhatikan adalah perlunya pembinaan terhadap kreativitas, karena dalam menempuh pendidikan di sekolah siswa juga disiapkan untuk menghadapi masalah-masalah yang ditemui di dalam kehidupannya yang kemungkinan sekali masalah tersebut belum pernah dipelajari di sekolah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya siswa juga harus disiapkan supaya dapat bekerja mencari nafkah secara mandiri, untuk itu juga diperlukan pembinaan kewirausahaan supaya siswa memiliki jiwa wirausaha. Pembinaan terhadap hal-hal tersebut penting karena diklat berbasis kompetensi hanya menekankan pada penguasaan pekerjaan di dunia usaha/industri, sedangkan belum tentu tamatan SMK nantinya dapat diterima bekerja di dunia usaha/industri.

Mengingat beberapa masalah seperti itu maka diperlukan suatu studi tentang bagaimana mengelola secara tepat diklat berbasis kompetensi ini dan mengembangkannya sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar, memiliki kreatifitas dan jiwa wirausaha, karena dalam hal ini kompetensi kejuruan saja tidak cukup.

## **B. Fokus Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah serta banyaknya masalah dalam implementasi diklat berbasis kompetensi di SMK selama ini, dapat disimpulkan bahwa selama ini masih terjadi kesenjangan antara kompetensi kejuruan tamatan SMK dengan kompetensi kejuruan yang dituntut dunia usaha/industri.

Kesenjangan tersebut timbul karena adanya masalah pokok yaitu : Pendidikan dan pelatihan (diklat) berbasis kompetensi di SMK belum dikelola dengan benar sesuai dengan prinsip diklat berbasis kompetensi. Lebih jauh dapat diuraikan permasalahan yang lebih rinci yaitu :

1. Perencanaan program diklat belum mengacu pada standar kompetensi kejuruan yang merupakan standar industri/lapangan kerja, serta belum didukung oleh sumber daya atau faktor pendukung yang memenuhi syarat.
2. Pelaksanaan diklat belum mengacu pada pengelolaan proses pembelajaran yang berprinsip belajar tuntas, seperti tuntutan diklat berbasis kompetensi. Pembinaan kreativitas dan kewirausahaan belum dilakukan secara benar sehingga dikhawatirkan tamatan akan kurang memiliki kreativitas dan kurang memiliki jiwa wirausaha, dan hanya mencetak tenaga pekerja saja.
3. Selain itu pada umumnya pelaksanaan uji kompetensi belum dilakukan oleh penguji atau industri yang memiliki pengakuan masyarakat. Sertifikasi sebagai pengakuan atas kompetensi yang dikuasai siswa belum dilakukan secara benar sesuai prinsip diklat berbasis kompetensi.

Mengingat administrasi pendidikan memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta memiliki bidang garapan sumber daya manusia, sumber belajar serta sumber fasilitas dan dana, maka letak permasalahan tersebut dalam administrasi pendidikan adalah pada bidang garapan Sumber Daya Manusia (SDM), karena diklat berbasis kompetensi yang dibahas di sini adalah dalam rangka peningkatan kompetensi peserta diklat/siswa dan memiliki prosedur atau metode tertentu. Sedangkan dalam hal fungsi maka posisinya adalah dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan karena yang dibahas adalah dalam hal pengelolaan diklat yang terdiri dari perencanaan diklat, meliputi

penetapan standar kompetensi dan penyiapan faktor pendukung, pelaksanaan diklat, meliputi pengelolaan proses pembelajaran, pembinaan kreativitas dan kewirausahaan terhadap peserta diklat/siswa maupun uji kompetensi dan sertifikasi setelah siswa mengikuti diklat.

Letak penelitian dalam administrasi pendidikan		BIDANG GARAPAN		
		SDM (siswa)	Sumber Belajar	Sumber Fasilitas dan Dana
FUNGSI	Perencanaan	X		
	Pelaksanaan	X		
	Pengawasan	X		

Gbr 1 : Letak penelitian dalam administrasi pendidikan

Dengan penjelasan di atas maka jelaslah bahwa permasalahan yang ada masuk dalam wilayah Administrasi Pendidikan dalam bidang garapan SDM, yaitu pengelolaan diklat berbasis kompetensi kejuruan bagi siswa SMK. Dari permasalahan pokok di atas maka fokus permasalahan pada penelitian ini adalah :

**“Apakah pendidikan dan pelatihan kejuruan di SMK telah dikelola secara tepat sesuai dengan prinsip-prinsip diklat berbasis kompetensi?”**

Selain fokus permasalahan yang dikemukakan dalam bentuk pertanyaan seperti di atas maka diklat berbasis kompetensi yang diamati dibatasi hanya pada pendidikan dan pelatihan kejuruan bidang keahlian teknik mesin program keahlian mesin perkakas, yang diselenggarakan di SMKN 2 Serang, SMK YPPT Garut, SMKN 4 Jakarta dan SMK

Texmaco Karawang. Sekolah-sekolah ini dipilih karena SMK tersebut menjadi SMK Model Penyelenggara Diklat Berbasis Kompetensi yang ditunjuk oleh Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Depdiknas.

Dari fokus permasalahan ini dapat diambil pertanyaan penelitian yang lebih rinci sebagai berikut :

1. Apakah perencanaan program diklat sudah mengacu pada standar kompetensi kejuruan yang merupakan standar industri/lapangan kerja, serta didukung/ sumber daya yang memadai?
2. Apakah pelaksanaan diklat sudah mengacu pada pengelolaan proses pembelajaran yang berprinsip belajar tuntas serta pembinaan kreativitas dan kewirausahaan sudah dilakukan secara benar sehingga tamatan memiliki kreativitas dan jiwa wirausaha?
3. Apakah uji kompetensi dan sertifikasi telah dilakukan oleh industri/asosiasi/badan yang memiliki pengakuan masyarakat sebagai pengakuan atas kompetensi yang telah dikuasai siswa?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan pendidikan dan pelatihan di SMK dengan prinsip-prinsip diklat berbasis kompetensi.

Secara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui :

- a. Kesesuaian perencanaan program diklat berbasis kompetensi terhadap Standar Kompetensi yang merupakan standar industri, serta dukungan sumber daya yang ada.



- b. Pelaksanaan diklat yang mengacu pada pengelolaan proses pembelajaran dengan prinsip belajar tuntas serta pelaksanaan pembinaan kreativitas dan kewirausahaan yang telah dilakukan oleh SMK.
- c. Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi sebagai pengakuan atas kompetensi kejuruan yang telah dikuasai siswa.

## 2. Manfaat penelitian :

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Memberikan masukan bagi SMK dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi para siswa di sekolah.
- b. Memberikan masukan bagi Direktorat Pendidikan Kejuruan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mengembangkan model pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi kejuruan yang tepat.
- c. Memberikan masukan bagi PPPG Teknologi sebagai lembaga penataran guru yang sekaligus sebagai pengembang SMK.
- d. Memperluas wawasan ilmu pendidikan dan pengelolaan terutama dalam hal pengelolaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

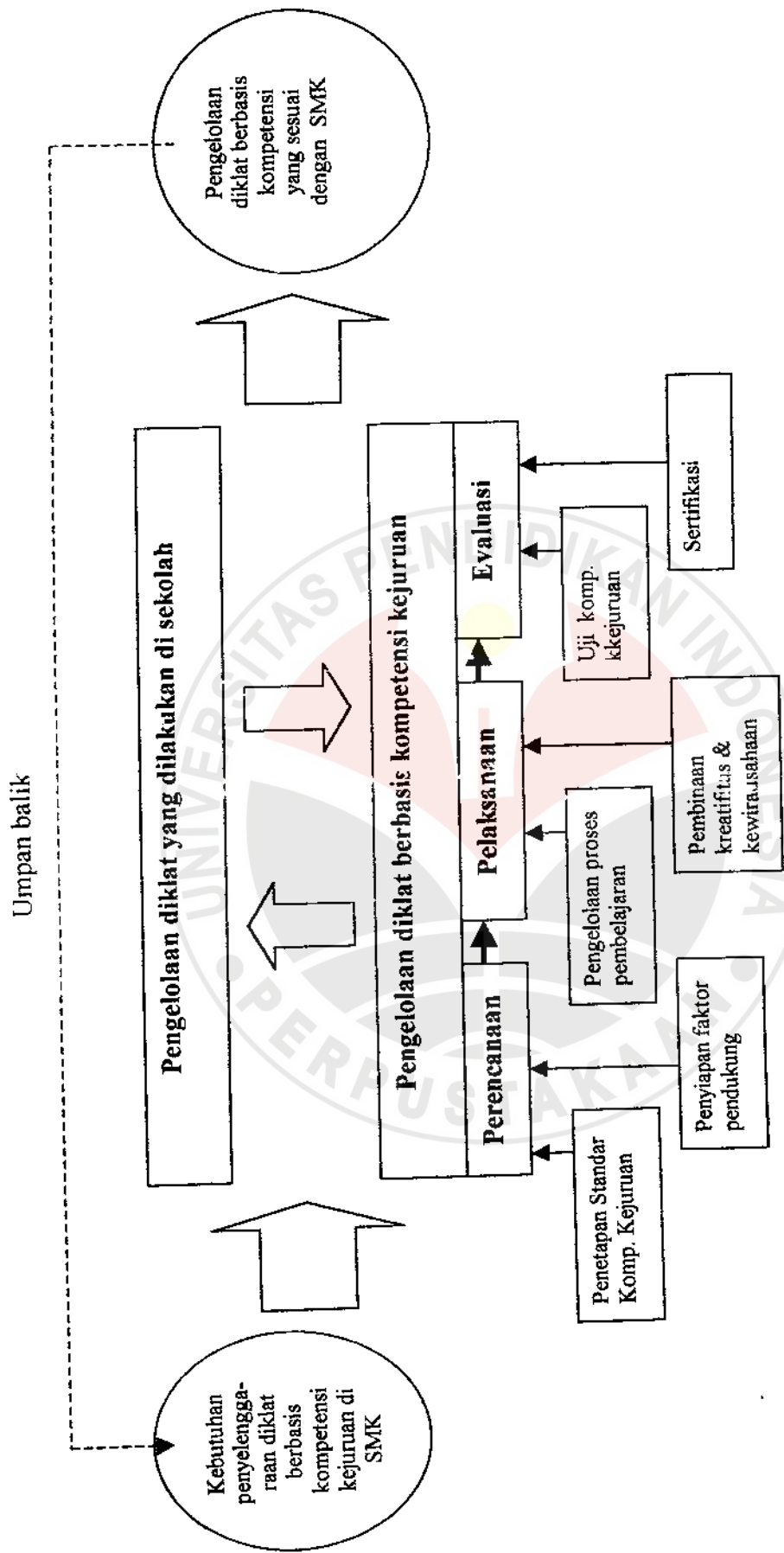
## D. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian atau kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berawal dari adanya kesenjangan antara kompetensi kejuruan tamatan SMK dengan tuntutan kompetensi kejuruan dunia usaha/industri maka diperlukan adanya diklat

berbasis kompetensi kejuruan yang mengacu pada standar kompetensi kejuruan dunia usaha/industri.

2. Supaya diklat berbasis kompetensi dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya maka memerlukan pengelolaan yang tepat, sesuai dengan karakteristik diklat berbasis kompetensi itu sendiri. Pengelolaan yang perlu dilakukan adalah dalam hal :
  - a. Perencanaan program diklat yang mengacu pada standar kompetensi dan dilanjutkan dengan penyiapan faktor pendukung yang sesuai.
  - b. Pelaksanaan diklat yang meliputi pengelolaan proses pembelajaran serta pembinaan kreativitas dan kewirausahaan supaya tamatan memiliki kreativitas dan jiwa wirausaha.
3. Dengan adanya perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan tersebut maka kemudian dilakukan uji kompetensi dan sertifikasi sebagai pengakuan atas kompetensi yang telah dikuasai siswa.
4. Dengan dilakukannya diklat berbasis kompetensi kejuruan tersebut maka diharapkan akan dapat mengatasi kesenjangan antara kompetensi kejuruan tamatan SMK dengan tuntutan kompetensi kejuruan dunia usaha/industri seperti yang selama ini terjadi.



Gbr. 2 : Kerangka pikir pengelolaan diklat berbasis kompetensi kejuruan yang sesuai untuk SMK